

PROSPEK EKONOMI INDONESIA: PERSPEKTIF MAKROEKONOMI

Sri Maryanti¹, Prama Widayat², Nurhayani lubis³

¹Universitas Andalas Padang Kampus Limau Manis, Padang

Jln. Universitas Andalas Padang Kampus Limau Manis, Padang

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Jln. D.I. Panjaitan KM 8 Rumbai Pekanbaru

E-mail : sri@student.unand.ac.id (Korespondensi)

diterima: 24/8/2022; direvisi: 14/3/2023; diterbitkan: 26/9/2023

Abstract: This study is a literary study that aims to analyze Indonesia's economic prospects from a macroeconomic perspective. This is very important considering that macroeconomic variables are very much used as indicators in economic development and growth. Such as inflation, the rate of population growth and so on. From this literature study, it was obtained that the Indonesian Economic Prospects for the future cannot be categorized as having a better prospect, this can be seen in the high level of displacement until 2022, even world economic observers think it is difficult for Indonesia to be able to suppress the growth rate of unemployment considering that during the Covid-19 pandemic alone there have been many layoffs. In addition, the inflation rate tends to increase due to the impact of the increase in consumer prices in Indonesia coupled with the Russian invasion of Ukraina which also has an indirect impact on Indonesia considering that Russia controls world gas and many European Union countries are very dependent on Russia.

Keywords: *Indonesia's Economic Prospects, Indonesia's Economic Development, Indonesia's Economic Growth*

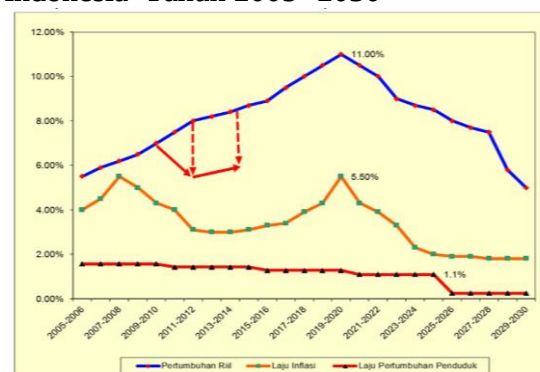
PENDAHULUAN

Prospek ekonomi negara dapat dilihat dari inflasi, indeks harga perdagangan besar, realisasi APBN, utang luar negeri, Indeks Keyakinan Konsumen, Investasi, neraca perdagangan, Indeks Penjualan Bersih dan cadangan devisa. Semua indikator berdampak terhadap kondisi suatu negara di mata dunia.

Perekonomian beberapa negara mengalami kemunduran saat Covid-19. Upaya pemulihan dilakukan dengan harapan Indonesia dapat masuk kedalam *High Income Country* (HIC) tahun 2030 jika pendapatan per kapita USD 15 ribu per tahun dan rata-rata pertumbuhan 13% per tahun. Pertumbuhan depresiasi rupiah 0,8% dan pertumbuhan penduduk 1,1% per tahun dan menggenjot sektor manufaktur hingga 2030. Namun rasanya sulit untuk bisa dicapai oleh Indonesia karena pertumbuhan ekonomi, inflasi dan

pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami perubahan.

Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2005- 2030



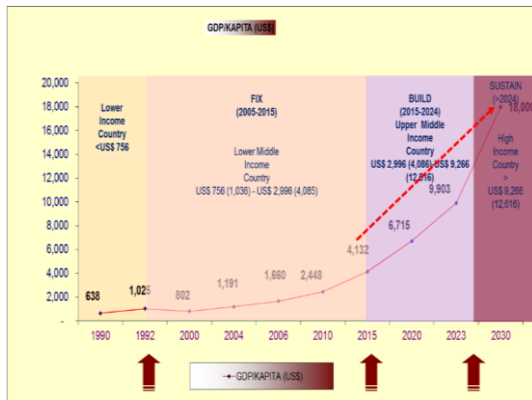
Sumber : Yayasan Indonesia Forum, 2007.

* Notes: Pertumbuhan Riil = Economic Growth; Laju Inflasi=Inflation Rate; Laju Pertumbuhan Penduduk=Population Growth Rate

Tahun 2010 kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan, mulai membaik tahun 2012 sebesar 8% dan terus meningkat di tahun 2016 sebesar 9%. Ini tidak bertahan lama karena harga minyak

dunia yang secara signifikan mempengaruhi harga ekspor primer Indonesia.

Gambar 2: Pendapatan Per Kapita Indonesia Tahun 1990-2030



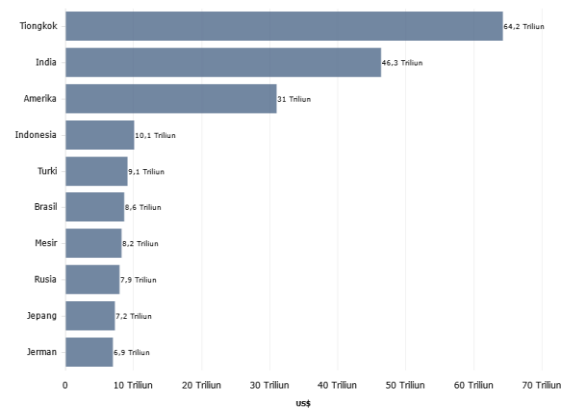
Sumber : Yayasan Indonesia Forum , 2007

Tahun 1990 posisi Indonesia *lower income* hingga berada pada posisi *lower middle income* di periode tahun 2000-2015, pasar sangat optimis di 2023-2030 Indonesia akan berada pada posisi *High Income Country* (HIC) dengan pendapatan USD 13 ribu, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal tersebut bisa terwujud?. Apakah benar Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia?. Bagaimana Prospek Perekonomi Indonesia Di masa Datang? Apakah ekonomi Indonesia dapat bertumbuh lebih cepat masuk dalam kategori *High Income Country* (HIC) 2030?.

Data dari *Standart Chatered Plc* (2019) Indonesia memiliki peluang untuk masuk daftar negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia, didasarkan pada perhitungan dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun dan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*)/PPP. *Purchasing Power Parity* digunakan untuk menentukan nilai tukar mata uang antar negara yang bertujuan untuk mengetahui apakah indikator ini akan berdampak terhadap peringkat kualitas kesejahteraan per kapita (Dicky, 2016)

maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tercapai diatas 5%.

Gambar 3: Data 10 Negara dengan PDB (menggunakan PPP) Terbesar di Dunia Pada Tahun 2030



Sumber: Standart Chatered Plc (2019)

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memprediksi ekonomi Indonesia kedepannya dari kacamata makroekonomi yang didasarkan kepada dasar teori yang pernah diulas oleh beberapa ahli ekonomi serta melihat fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Manfaat dari kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kondisi ekonomi Indonesia untuk masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam kajian ini ada studi literature dari data-data serta artikel dan teori yang telah pernah mengkaji kondisi Indonesia sebelum dan setelah covid -19.

TINJAUAN PUSTAKA

Keberhasilan suatu negara dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi (Tambunan, 2016) pertumbuhan ekonomi dapat meningkat jika output barang dan jasa meningkat dan berdampak terhadap pendapatan nasional. Pada gambar 2 terlihat ada tiga penyebab mengapa Indonesia bisa naik kelas (Basri,2020) yaitu: Jumlah penduduk Indonesia yang terus mengalami peningkatan yang diperkirakan tahun 2050 bisa menembus angka 300 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak di

Indonesia sedangkan negara maju lebih banyak didominasi oleh penduduk usia matang sehingga relative sedikit yang bisa bekerja dengan produktivitas yang tinggi.

Tahun 2020, ketika seluruh dunia berjuang untuk menahan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan *Lockdown*, aktivitas ekonomi mengalami kontraksi pada tahun 2020 di sekitar 90 persen negara. Depresiasi Hebat tahun 1930-an, krisis utang ekonomi yang muncul tahun 1980-an, dan krisis keuangan global 2007-an. Ekonomi global menyusut sekitar 3 persen dan kemiskinan global meningkat untuk pertama kalinya dalam generasi.

Pemerintah memberlakukan respons kebijakan yang cepat termasuk menggunakan kombinasi kebijakan sektor fiskal, moneter, dan keuangan untuk mengurangi dampak buruk pandemi. Resiko ini cenderung muncul lebih cepat di negara-negara berkembang dan terutama di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana kapasitas pembawa utang publik dan swasta jauh lebih rendah daripada di negara maju.

Untuk memulihkan kondisi Indonesia pasca Covid-19 maka banyak bantuan yang diperoleh pemerintah Indonesia dari Tiongkok melalui pinjaman untuk membangun infrastruktur. Agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat.

Menjadi perhatian pemerintah yaitu inflasi karena berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi di suatu negara terjadi karena (Agarwal et al., 2022) adanya informasi harga pada produk berkualitas lebih baik atau tidak akan mempengaruhi fluktuasi dari inflasi. Hal yang sama juga diutarakan oleh (Han et al., 2022) bahwa setiap informasi yang tersebar akan berdampak terhadap inflasi dimana pentingnya dalam mengukur sebuah informasi.

Tingkat inflasi tinggi yang berbasis luas dan terus-menerus di seluruh dunia dapat menandai titik balik setelah dua dekade inflasi rendah dan stabil (Olivier Blanchard, 2022). Inflasi kemungkinan akan tetap tinggi bahkan jika guncangan inflasi baru-baru ini agak mereda karena pertumbuhan global mereda, harga energi dan makanan turun dan kemacetan pasokan berukurang. Kebijakan moneter memiliki alat untuk akhirnya membendung lonjakan inflasi, dan mengembalikannya ke tingkat target dari waktu ke waktu (Summer, 2022).

Menurut (GWARTNEY & STROUP, 2014) ketika infalsi terjadi maka permintaan aggregate dan ahrga akan meningkat. Sehingga pembatasan kebijakan moneter dapat mengurangi masalah tersebut. Dalam kerangka kerja Keynesian, efek dari kebijakan moneter restriktif ditransmisikan melalui dampaknya pada tingkat bunga. Ketika tingkat bunga meningkat, investor memilih untuk melepaskan beberapa proyek investasi yang kurang menguntungkan. Suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya peluang investasi dalam modal fisik. Investasi swasta akan menurun, karena beberapa calon investor memilih untuk membeli obligasi dari barang modal. Penurunan investasi swasta akan mengurangi baik agregat permintaan dan tekanan inflasi. Dengan demikian, kebijakan moneter yang ketat dapat membantu untuk membendung gelombang inflasi.

Kebijakan yang diambil masa pandemi COVID-19 dapat menurunkan inflasi global vuma bersifat sementara. *Rebound* inflasi dari palungnya lebih cepat dan lebih curam setelah resesi global 2020 daripada episode sebelumnya. Inflasi global terus turun selama satu hingga tiga tahun setelah resesi global sebelumnya. Inflasi mulai meningkat dalam waktu kurang dari satu tahun dalam resesi global 2020. April 2021, inflasi meningkat di atas tingkat pra-pandemi di

negara maju dan Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs). Di Indonesia tahun 2018-2022 tingkat inflasi cenderung meningkat dan tingkat pengangguran berfluktuasi dan sempat naik di tahun 2019 ke 2020 dan 2021. Ini berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan hingga 29,3 juta jiwa orang dengan tingkat kemiskinan 10,81% walau disinyalir pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,5% namun tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1: Perkembangan Inflasi, Tingkat Pengangguran, Angkatan Kerja, Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Inflasi (%)	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah Pengangguran (Juta Orang)	Angkatan Kerja (Juta Orang)	Angka Kemiskinan (Juta Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2018	3,13	5,3	7,05	133,94	25,67	9,82	5,17
2019	2,27	5,23	7,05	136,18	25,14	9,41	5,02
2020	1,68	7,07	9,77	138,2	27,75	9,78	-2,07
2021	1,87	6,49	9,10	140,15	26,50	9,71	3,69
2022	3,6	6,3	6,49	na	29,3	10,81	5,5

Sumber : BPS

Prediksi perekonomian Indonesia akan kembali pulih melihat angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,69% dengan asumsi Indonesia tidak akan mengalami gelombang baru Covid-19. Salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian dengan peluncuran vaksin. Disamping itu kebijakan moneter dan fiskal dalam negeri tetap akomodatif dan perdagangan global serta harga komoditas meningkat ditengah kondisi pengetatan keuangan global. Konsumsi sektor swasta dan pelayanan publik akan segera pulih seiring meluasnya penyebaran vaksin yang digalakkan oleh

pemerintah. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Proyeksi Pemulihan Ekonomi di Indonesia Tahun 2019-2023

		2019	2020	2021	2022	2023
Real GDP growth	(Annual percent change)	5.0	-2.1	3.7	5.2	5.1
Inflation	Percent	2.8	2.0	1.6	2.2	2.5
Current account balance	(Percent of GDP)	-2.7	-0.4	0.2	-1.2	-1.6
Fiscal balance	(Percent of GDP)	-2.2	-6.1	-5.0	-3.9	-3.0
Public debt	(Percent of GDP)	30.2	39.4	41.8	43.7	44.3

Source: BI, Central Bureau of Statistics (BPS), Ministry of Finance, World Bank staff calculations

Karena kondisi pandemi akan berdampak buruk terhadap kondisi keuangan global dan kinerja sektor keuangan. Kerugian yang ditimbulkan dari kondisi ini seperti kerugian ekonomi, sosial serta pertumbuhan investasi yang melambat disebabkan oleh permintaan, penawaran dan ekspektasi pertumbuhan yang terus menerus rendah, serta akumulasi modal manusia dan pertumbuhan produktivitas yang lebih lambat memicu terjadi pengangguran yang berkepanjangan.

Efek ini cenderung menurunkan potensi pertumbuhan, mengurangi pengentasan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan dalam jangka menengah. Potensi turun sebesar 0,1 % tahun 2020 setelah turun sebesar 1,3%. Dengan kondisi tersebut maka akan berdampak terhadap meningkatnya pencari kerja usia muda yang bekerja pada sektor informal dimana proporsi penduduk usia muda yang tidak bekerja meningkat dua kali lipat selama masa pandemic menjadi 16,4%.

Untuk membangun ekonomi di Indonesia yaitu menjaga kebijakan moneter dan keuangan yang memadai, dimana ekonomi masih dibawah potensi untuk meningkat sehingga kondisi keuangan global kemungkinan akan mulai mengetat sebelum Indonesia dan pasar negara berkembang lainnya pulih. Meningkatnya

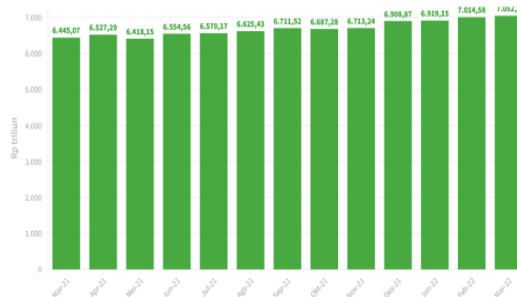
kebijakan fiskal untuk memenuhi kebutuhan dan pembiayaan hidup serta utang negara jangka menengah. Memajukan reformasi structural untuk mendorong pertumbuhan inklusif serta mendorong pertumbuhan structural sehingga produktivitas masyarakat dapat meningkat.

Dari gambar 1 jika dianalisis secara makroekonomi dari data diatas ada beberapa indikator keseimbangan ekonomi yang harus menjadi agar dapat memperkuat perekonomian Indonesia yang sempat mengalami penurunan. Indikator yang harus jadi perhatian pemerintah Indonesia agar Indonesia bisa masuk kedalam *HIC* yaitu $(S-I) + (Tx - G) = (X-M)$. Selama tahun 2010-2012 terjadi in-efisiensi investasi dimana rasio ouput modal (*ICOR*) meningkat dari 5,7 menjadi 6,9 pada tahun 2013-2015. Iklim investasi Indonesia menurun disebabkan oleh banyak perusahaan baru. Penundaan investasi berdampak terhadap pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa itu.

Dari transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit sejak kuartal satu – kuartal empat di tahun 2016 , defisit terjadi adanya tekanan pada nilai rupiah yang terlalu rendah sehingga terjadi depresiasi rupiah terhadap USD tinggi hingga 14 ribu per USD nya tahun 2018. Penurunan efisiensi investasi (*S-I*) dan keseimbangan eksternal (*X-M*) dapat menekan anggaran pemerintah (*Tx-G*) dan utang public per PDB menjadi meningkat, jumlah utang Indonesia cenderung meningkat hingga di Maret tahun 2022 mencapai Rp 7.052,5 triliun atau naik sebesar 0,54% dari tahun sebelumnya, peningkatan jumlah utang ini terjadi karena penerbitan surat berharga negara (*SBN*) dan penarikan pinjaman pada Maret 2022 dengan tujuan untuk menutupi

APBN. Utang pemerintah Indonesia ini lebih didominasi oleh *SBN* sebesar 88,24% atau Rp 6.222,94 triliun.

Gambar 3: Posisi Utang Pemerintah Indonesia Periode Maret 2021-Maret 2022



Sumber: Kementerian Keuangan

Dampak utang pemerintah yang terus merangkak naik tentunya akan berdampak terhadap turunnya pengeluaran pembangunan, ketersediaan dana yang relative kecil akan membatasi pertumbuhan investasi produktif yang mengakibatkan menyusutnya pembayaran utang ekonomi, ini yang disebut dengan efek crowding out (Adyah, 2020). Menurut (Eichler & Pyun, 2022) kehadiran kreditur asing disebuah negara dalam konteks memberikan pinjaman kepada negara tersebut berdampak terhadap sumberdaya yang dimiliki oleh negara peminjam. Menurut (Maitra, 2019) utang dapat menekan pendapatan dan merangsang tingkat harga. Utang memiliki dampak merusak baik pada tingkat pendapatan maupun harga. Namun utang luar negeri dapat menaikkan suku bunga jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Studi ini meneliti nexus pertumbuhan utang publik-ekonomi menggunakan data dari tujuh puluh satu negara berkembang dari tahun 1984 hingga 2015, menggunakan model ambang batas panel dinamis yang disarankan oleh Kremer et al. (2013).

Hasil empiris menunjukkan bahwa nilai ambang rasio utang publik terhadap PDB adalah 51,65 persen untuk negara berkembang. Rasio ambang batas utang terhadap PDB yang lebih rendah di negara-negara berkembang daripada yang

dilaporkan dalam literatur sebelumnya. Ketika utang publik melebihi ambang batas, ia memiliki efek negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi efeknya tidak signifikan di bawah ambang batas itu. Negara-negara berkembang mungkin memiliki ambang batas utang publik yang rendah karena mereka memiliki kemampuan yang lebih lemah untuk mengumpulkan pajak, dan pajak mungkin lebih rendah (Law et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian studi literature. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil analisis dari kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Studi literature ini juga diperkuat dengan data-data terkini yang dapat memperkuat analisis dari kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemerintah Indonesia untuk bisa membangun perekonomian ini memang membutuhkan waktu seperti selama pandemi covid-19 hingga pasca pandemi covid-19 banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan karena PHK besar-besaran. Pemulihan untuk pasar tenaga kerja akan terus berlanjut bahkan diperkirakan selama tahun 2022 ini belum mengalami perubahan (lihat tabel 1) hal ini terjadi karena adanya gangguan pasar tenaga kerja yang disebabkan oleh krisis. Banyak angkatan kerja yang berharap jadi tenaga kerja penuh. Berdasarkan hasil kajian yang di publish oleh *World Employment and Social Outlook- Trend 2022* bahwa untuk pemulihan pasar tenaga kerja paling cepat terjadi di negara-negara berpenghasilan tinggi. Untuk negara yang berpenghasilan

menengah ke bawah pemulihan lambat terjadi karena dampak pandemi ini yang tidak proporsional terhadap lapangan kerja sehingga kesenjangan cukup besar terjadi di masa yang akan datang.

Perbedaan yang paling menonjol terjadi di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas, dimana rasio *employment to population* tahun 2022 diproyeksikan menjadi 1,8% khususnya tenaga kerja perempuan. Penutupan sekolah dalam jangka waktu yang lama melemahkan hasil belajar dan berimplikasi jangka panjang untuk pekerjaan dan pendidikan serta pelatihan khususnya tenaga kerja muda, terutama yang memiliki keterbatasan akses untuk belajar online. Pandemi mendorong terjadinya perubahan ekonomi karena menciptakan ketidakpastian apakah pandemi dapat mempercepat keluarnya pasar tenaga kerja yang structural atau transformasi penghematan tenaga kerja?. Untuk kondisi di Indonesia banyak dari penduduk di negeri ini lebih cenderung untuk membuka usaha atau wiraswasta sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ada stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia terutama di masa pasca pemulihan covid-19 ini antara lain adalah: Masyarakat diharapkan terus melanjutkan usaha yang telah lama di geluti sebelum covid-19 terjadi. Pemerintah menyediakan program bantuan berupa relaksasi iuran ketenagakerjaan, insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman. Menyediakan peluang kerja bagi masyarakat melalui jaring pengaman sosial. Memberikan pelatihan kepada para pekerja yang terkena PHK melalui model vokasi. Pengadaan program padat karya, terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja mandiri dan kewirausahaan dengan tujuan adanya penyerapan tenaga kerja. Menyediakan

panduan perlindungan terhadap tenaga kerja dan perusahaan.

Semua stimulus yang dikeluarkan pemerintah belum dapat menekan jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia dan jumlah ini akan terus bertambah mengingat banyak dunia usaha yang belum bisa pulih dari pandemi covid 19 ini. Hal ini diperparah dengan kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok di Indonesia sehingga masyarakat makin sulit dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka karena belum dapat memperoleh pekerjaan. Jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum dapat terealisasi maka Indonesia belum bisa keluar dari tingkat pengangguran untuk masa yang akan datang dan ini akan berpengaruh terhadap prospek ekonomi Indonesia di masa datang.

Tingkat pengangguran sangat berkorelasi terhadap kemiskinan (lihat tabel 1) tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung meningkat bahkan di tahun 2022. Menurut Todaro (2018) bahwa pengangguran dan kemiskinan memiliki korelasi yang positif bahwa tingginya tingkat pengangguran akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Inflasi menjadi semakin tersinkronisasi secara global. Kontribusi faktor global terhadap variasi inflasi domestik telah tumbuh dari waktu ke waktu: sejak 2001, hampir dua kali lipat dan sekarang menyumbang 22% dari variasi inflasi (Ha et al. 2019b). Dalam kasus EMDE, faktor global telah menjelaskan sekitar seperlima dari variasi inflasi selama dua dekade terakhir. Siklus inflasi global yang menguat dapat memberi tekanan ke atas pada inflasi EMDE.

Faktor global seperti guncangan harga komoditas dan gangguan pasokan

memainkan peran utama dalam mendorong variasi jangka pendek dalam inflasi domestik di EMDEs. Ada risiko bahwa dorongan lebih lanjut dari melonjaknya energi dan harga makanan dapat mengganggu ekspektasi inflasi mereka yang baru-baru ini berlabuh. Perang di Ukraina telah menyebabkan gangguan dalam pasokan komoditas pertanian yang menaikkan harga pangan. Kenaikan harga energi dan pupuk - atau lebih buruk lagi, penutupan pasokan lengkap karena perang - dapat mengatur kembali penanaman dan panen. Ini akan semakin memicu inflasi makanan selama beberapa bulan ke depan. Di negara-negara berpenghasilan rendah, yang memiliki stok makanan yang tinggi dalam keranjang konsumsi mereka, kenaikan tajam harga pangan dapat memperburuk tekanan inflasi dan meningkatkan tantangan kebijakan moneter.

Invasi Ukraina dan kenaikan suku bunga kebijakan di beberapa negara maju utama telah berkontribusi pada peningkatan volatilitas pasar keuangan tetapi belum memicu pengetatan material terhadap kondisi keuangan global. Namun demikian, lonjakan inflasi global baru-baru ini dan siklus pengetatan global kemungkinan akan memiliki implikasi signifikan bagi Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs).

Untuk mengurangi dampak buruk dari siklus pengetatan di negara maju dan lonjakan harga komoditas saat ini, kebijakan EMDE akan memerlukan kalibrasi yang cermat, formulasi yang kredibel dan komunikasi yang jelas. Pendekatan ini dapat sangat membantu dalam membuat ekonomi ini lebih tahan terhadap perubahan mendadak di pasar keuangan global.

Di sebagian besar negara berpenghasilan rendah, inflasi juga diperkirakan akan tetap tinggi tahun ini, dan mungkin hingga 2022 khususnya karena inflasi harga pangan dua digit. Meningkatnya inflasi dan tekanan fiskal

dapat meningkatkan ketegangan antara berbagai tujuan bank sentral negara berpenghasilan rendah (Ha et al. 2019c, Bank Dunia 2022). Upaya kebijakan yang lebih luas yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan fiskal dan moneter, dan meningkatkan manajemen utang, diperlukan dalam ekonomi ini untuk menjaga stabilitas harga.

Teori Pertumbuhan Klasik menyebutkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa yaitu populasi penduduk, stok barang dan modal, kekayaan alam dan teknologi, kalau menurut Keynes bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh pengeluaran aggregate melalui investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berada pada rate 5,5% bahkan kemungkinan akan bisa turun. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi covid-19 yang melanda sejak tahun 2020. Jika pun ada pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi pada kuartal ke II tahun 2020 karena adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa saja meningkat, namun ada resiko yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek yaitu: *The Downside Risk*, jika masih ada potensi peningkatan kasus covid-19 akan berdampak terhadap terjadinya pengetatan di pasar keuangan global hal ini selaras dengan terjadinya peningkatan inflasi yang memicu terjadinya pengetatan kebijakan moneter. *Upside Risk*, dimana dengan harga-harga yang masih relative tinggi maka akan menjadi potensi ekspor bagi Indonesia karena akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Climate Change Risk*, Bahwa perubahan iklim tentunya akan berdampak terhadap tekanan fiskal dan terhadap ekonomi Indonesia.

Indonesia bisa saja masuk dalam “Keajaiban Asia” seperti halnya yang pernah di capai oleh Jepang dan Korea saat ini yang merupakan negara yang memiliki pendapatan tinggi dengan memfokuskan pada industrialisasi dimana Jepang dan Korea memasukkan konsep Rostow’s dengan klasifikasi ekonominya yaitu Tradisional, Pra-Kondisi untuk *Take Off*, *Take Off*, (*Maturity & High Mass Consumption*) dan konsep klasifikasi pendapatan negara (*LMIC*, *Upper Middle Income Country/LMIC*, *UMIC*, *High Income Country/HIC*) berdasarkan standar Bank Dunia, dapat diamati bahwa melalui industrialisasi, Jepang hanya membutuhkan waktu 17 tahun (1961-1978) untuk bangkit dari LIC tradisional atau berkembang menjadi Mengembangkan HIC dan melarikan diri dari Middle-Income Trap (MIT).

Indonesia selama kurang lebih 50 tahun (1967-2017) telah beranjak dari *pre-condition from take - off* mengembangkan *LIC* ke posisi *Take Off*. Di bawah skenario optimis, estimasi tercepat untuk mencapai *HIC* Maju akan pada tahun 2037. Jika pencapaian ini berhasil maka Indonesia mengambil sekitar 70 tahun untuk bangkit dari *LIC* menjadi *HIC*. Indonesia butuh waktu lebih lama dan mungkin tidak akan berhasil dan terjebak di negara berpenghasilan menengah tingkat dan tidak pernah memasuki negara berpenghasilan tinggi yang maju jika dia kehilangan kekuatan sumber ekonomi pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghindari jebakan tersebut, seperti yang saya sebutkan di awal tulisan ini, Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bersumber dari daya saing global sektor manufaktur dengan faktor kemajuan teknologi yang menambah tenaga kerja dan menjadi bagian dari jaringan rantai nilai setidaknya tingkat regional Asia Tenggara serta memiliki daya saing global dan UMKM yang berorientasi ekspor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Prospek Ekonomi Indonesia untuk masa yang akan datang belum bisa memiliki prospek yang lebih baik. Masih tingginya tingkat pengangguran hingga tahun 2022 bahkan para pengamat ekonomi dunia mengatakan sulit bagi Indonesia untuk dapat menekan laju pertumbuhan pengangguran mengingat dimasa pandemi covid-19 saja telah banyak terjadi PHK.

Tingkat inflasi yang cenderung meningkat disebabkan kenaikan harga komoditi di Indonesia, ditambah lagi adanya Invasi Rusia ke Ukraina yang juga berdampak terhadap Indonesia secara tidak langsung mengingat Rusia menguasai Gas dunia dan banyak negara Uni Eropa yang sangat bergantung kepada Rusia. Terjadi adalah kelangkaan minyak goreng yang rata-rata padahal Indonesia merupakan produsen terbesar CPO namun kelangkaan terjadi karena masih ada permainan dari mafia dalam CPO ini.

Prospek Ekonomi Indonesia bisa saja maju asalkan pemerintah mampu menekan laju pertumbuhan inflasi dan pengangguran dan melakukan penegakkan hukum karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat rendah mensinyalir sulitnya produktivitas masyarakat meningkat karena banyak kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah terhadap investor asing seperti masuknya tenaga kerja asing di Indonesia terutama yang berasal dari Tiongkok karena pemerintah Indonesia banyak memperoleh pinjaman dari negara Tiongkok salah satunya adalah proyek pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyah, S. (2020, May 18). Dampak Utang Luar Negeri bagi Perekonomian Indonesia .
Www.Kompasiana.Com.
- Agarwal, S., Chua, Y. H., & Song, C. (2022). Inflation Expectations of Households and the Upgrading

Channel. *Journal of Monetary Economics*.

<https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2022.04.003>

Dicky, A. (2016). *Puchasing power Parity in Indonesia: New Evidance*.

Eichler, S., & Pyun, J. H. (2022). Ricardian equivalence, foreign debt and sovereign default risk. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 197, 21–49.
<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.02.021>

GWARTNEY, J. D., & STROUP, R. (2014). Money, Employment, Inflation, and a More Complete Keynesian Model. *Macroeconomics*, 255–277.
<https://doi.org/10.1016/b978-0-12-311071-8.50019-6>

Han, Z., Ma, X., & Mao, R. (2022). The Role of Dispersed Information in Inflation and Inflation Expectations. *Review of Economic Dynamics*.

<https://doi.org/10.1016/j.red.2022.04.001>

Law, S. H., Ng, C. H., Kutan, A. M., & Law, Z. K. (2021). Public debt and economic growth in developing countries: Nonlinearity and threshold analysis. *Economic Modelling*, 98(January), 26–40.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.02.004>

Maitra, B. (2019). Macroeconomic impact of public debt and foreign aid in Sri Lanka. *Journal of Policy Modeling*, 41(2), 372–394.
<https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.03.002>

Olivier Blanchard. (2022, March 14). *Why I worry about inflation, interest rates, and unemployment*. PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS.

- Summer. (2022). *“The Stock Market Liked the Fed’s Plan to Raise Interest Rates. It’s Wrong”*,.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://bps.go.id>
- Basri,Faizal (2020), Indonesia Rangking 7 Dunia, <https://faisalbasri.com/2020/02/23/indonesia-ranking-7-dunia/>
- Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-menuju-lima-besar-dunia>
- Ha, J., M. A. Kose, and F. Ohnsorge (2019b), “Global Inflation Synchronization.” CEPR Discussion Paper 13600
- Ha, J. A. Ivanova, P. Montiel, and P. Pedroni (2019c), “Inflation in Low-Income Countries”, World Bank Policy Research Working Paper 8934
- Kremer,S,Bick,.,Nautz.,D (2013). Inflation and growth : new evidence from a dynamic panel threshold analysis. *Empir. Econ.* 44(2), 861-878
- Tambunan (2016), *Perekonomian Indonesia Era Ordelama Hingga Jokowi*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Todaro, (2018), *Ekonomi Pembangunan* Yayasan Indonesia Forum, <http://worldcat.org/identities/lccn-n93904053/>